

## **BAGIAN ANGGARAN 032**



## **LAPORAN KEUANGAN**

**BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU  
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA II  
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU  
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
SEMESTER II  
TAHUN ANGGARAN 2023**

*Jl. Swasembada Timur XIII No. 64, Tanjung Priok - Jakarta Utara  
Telp.(021) 43910470,4371604, 43903634, Fax. (021) 43903634  
[bkipm.jakarta2@gmail.com](mailto:bkipm.jakarta2@gmail.com)*

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

**Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta II** adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Semester II **Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta II** mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kaidah-Kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan Semester II ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan

transparansi pengelolaan keuangan negara pada **Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta II**. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 31 Desember 2023

Kepala



Hasim, S.Pi, M.Pi  
NIP. 19741019 199403 1 002

**DAFTAR ISI**

	<b>Hal</b>
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	iii
Pernyataan Tanggung jawab.....	iv
Ringkasan Laporan Keuangan .....	1
Laporan Realisasi Anggaran .....	3
Neraca .....	4
Laporan Operasional .....	6
Laporan Perubahan Ekuitas .....	7
Catatan Atas Laporan Keuangan ( CALK) .....	2
Penjelasan Umum .....	8
Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran.....	21
Penjelasan Atas-Pos-Pos Neraca .....	30
Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional .....	46
Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Laporan Ekuitas .....	53
Pengungkapan - Pengungkapan Lainnya .....	57
Lampiran .....	61



Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan  
Keamanan Hasil Perikanan Jakarta II

Telp.021-43903634 Fax.021-43903634 email: bkipm.jakarta2@gmail.com

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Semester I Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta II yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan **Semester II Tahun Anggaran 2023** sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 31 Desember 2023

Kepala



Hasim, S.Pi, M.Pi

NIP. 19741019 199403 1 002

**RINGKASAN LAPORAN  
KEUANGAN**

Laporan Keuangan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta II Tahun Anggaran 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dilingkungan pemerintah. Laporan Keuangan ini meliputi :

**1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar **Rp.11.285.528.826,-** atau mencapai **114,81 persen** dari estimasi pendapatan-LRA sebesar **Rp.9.829.845.000,-**. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp.11.177.780.000,-** atau mencapai **106,29 persen** dari estimasi pendapatan-LRA sebesar **Rp.9.401.202.000,-**.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar **Rp.14.811.041.544,-** atau mencapai **99,39 persen** dari alokasi anggaran sebesar **Rp.14.902.255.000,-**. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp.15.193.523.092,-** atau mencapai **99,27 persen** dari alokasi anggaran sebesar **Rp.15.304.483.000,-**.

**2. NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada Tahun Anggaran 2023.

Nilai Aset Per **31 Desember 2023** dicatat dan disajikan sebesar **Rp.21.948.398.779,-** yang terdiri dari Aset Lancar sebesar **Rp.412.602.767,-** Aset Tetap (neto) sebesar **Rp.21.535.796.012,-** Piutang Jangka Panjang (neto) **Rp.0,-** dan Aset Lainnya (neto) sebesar **Rp.0,-**.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar **Rp.38.787.816,-** dan **Rp.21.909.610.963,-**.

### 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan/LO, beban, Surplus/Defisit dari operasi, surplus atau defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa dan surplus atau defisit/LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan **31 Desember 2023** adalah sebesar **Rp.11.177.780.000,-** sedangkan jumlah beban adalah sebesar **Rp.16.165.866.443,-** sehingga terdapat defisit dari kegiatan operasional senilai **Rp.(4.988.086.443,-)** kegiatan non operasional dan pos-pos luar biasa masing-masing surplus sebesar **Rp.27.608.826,-** dan surplus sebesar **Rp.0,-** sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar **Rp.(4.960.477.617,-)**.

### 4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas Tahun pelaporan dibandingkan dengan Tahun sebelumnya. Ekuitas pada Tanggal **01 Januari 2023** adalah sebesar **Rp.23.210.524.862,-** dikurangi defisit-LO sebesar **Rp.(4.960.477.617,-)**, kemudian ditambah dengan koreksi nilai persediaan senilai **Rp.0,-**, dan ditambah koreksi atas reklasifikasi senilai **Rp.968.000,-**, dan ditambah transaksi antar entitas sebesar **Rp.3.658.595.718,-** dan ditambah dengan kenaikan ekuitas senilai **Rp.(1.300.913.899,-)**, sehingga ekuitas entitas pada Tanggal **31 Desember 2023** adalah senilai **Rp.21.909.610.963,-**

### 5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta

pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal **31 Desember 2023**, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas sedangkan Neraca, laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

## I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN  
KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA II  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022**

( Dalam rupiah )

URAIAN	CATATAN	TA. 2023		% thd	TA. 2022
		ANGGARAN	REALISASI	Anggaran	REALISASI
<b>A. PENDAPATAN</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	9.829.845.000	11.285.528.826	114,81	9.992.298.913
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>9.829.845.000</b>	<b>11.285.528.826</b>	<b>114,81</b>	<b>9.992.298.913</b>
<b>B. BELANJA</b>	<b>B.2.</b>				
Belanja Pegawai	B.3.	7.768.606.000	7.687.285.495	98,95	7.558.919.919
Belanja Barang	B.4.	6.602.414.000	6.592.316.153	99,85	6.635.104.873
Belanja Modal	B.5.	531.235.000	530.899.896	99,94	999.498.300
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>14.902.255.000</b>	<b>14.810.501.544</b>	<b>99,38</b>	<b>15.193.523.092</b>

II. NERACA

BALAI KIPM JAKARTA II  
NERACA  
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

URAIAN	CATATAN	2023	2022
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Persediaan	C.1	412.602.767	911.640.157
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>		<b>412.602.767</b>	<b>911.640.157</b>
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	C.2	10.118.066.000	10.118.066.000
Peralatan dan Mesin	C.3	16.359.346.851	15.828.446.955
Gedung dan Bangunan	C.4	10.358.049.540	10.358.049.540
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.5	316.816.000	316.816.000
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.6	-	80.140.000
AKUMULASI PENYUSUTAN	C.7	(15.616.482.379)	(14.452.982.990)
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>		<b>21.535.796.012</b>	<b>22.248.535.505</b>
<b>ASET LAINNYA</b>			
Aset Tak Berwujud	C.8	349.800.000	349.800.000
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	C.9	(349.800.000)	(262.350.000)
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>		<b>-</b>	<b>87.450.000</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>21.948.398.779</b>	<b>23.247.625.662</b>

<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.10	38.787.816	37.100.800
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		<b>38.787.816</b>	<b>37.100.800</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>38.787.816</b>	<b>37.100.800</b>
<b>EKUITAS</b>			
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.11	21.909.610.963	23.210.524.862
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>21.909.610.963</b>	<b>23.210.524.862</b>
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>21.909.610.963</b>	<b>23.210.524.862</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>21.948.398.779</b>	<b>23.247.625.662</b>

**III. LAPORAN  
OPERASIONAL**

**BALAI KIPM JAKARTA II  
LAPORAN OPERASIONAL  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022**

URAIAN	CATATAN	2023	2022
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	11.177.780.000	9.950.680.000
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>11.177.780.000</b>	<b>9.950.680.000</b>
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.2	7.687.825.495	7.558.919.919
Beban Persediaan	D.3	1.585.618.697	689.085.475
Beban Barang dan Jasa	D.4	3.643.006.260	3.520.650.402
Beban Pemeliharaan	D.5	879.224.612	746.607.794
Beban Perjalanan Dinas	D.6	1.119.241.990	1.101.834.647
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	1.250.949.389	1.565.213.461
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
Beban Lain-lain	D.11	-	-
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>16.165.866.443</b>	<b>15.182.311.698</b>
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		<b>(4.988.086.443)</b>	<b>(5.231.631.698)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	D.12		
Surplus Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA		27.608.826	(38.109.160)
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		27.608.826	(38.109.160)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		<b>(4.960.477.617)</b>	<b>(5.269.740.858)</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>	D.13		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>		<b>(4.960.477.617)</b>	<b>(5.269.740.858)</b>

## IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BALAI KIPM JAKARTA II**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022**

URAIAN	CATATAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	E.1	23.210.524.862	23.040.763.341
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(4.960.477.617)	(5.269.740.858)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3	-	-
<b>KOREKSI YANG MANAMBAH/MENGURANGI EKUITAS</b>		<b>968.000</b>	<b>150.610.950</b>
Penyesuaian Nilai aset	E.4	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.5	-	131.974.857
Koreksi atas Reklasifikasi	E.6	968.000	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.7	-	-
Koreksi nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.8	-	18.636.093
Lain-Lain	E.9	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.10	3.658.595.718	5.288.891.429
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.11	(1.300.913.899)	169.761.521
<b>EKUITAS AKHIR</b>		<b>21.909.610.963</b>	<b>23.210.524.862</b>

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. PENJELASAN UMUM

Dasar  
Hukum  
entitas dan  
rencana  
strategis

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta II

Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta II didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sesuai dengan PMK 2005/PMK.011/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal. Berkedudukan di Jalan Swasembada Timur XIII No.64 Tanjung Priok dan Jl. Enggano Raya No.16 Tanjung Priok, Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta II mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan fungsi utamanya melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) ke/di/keluar/wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta penerapan sistem manajemen mutu. Melalui peran Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta II diharapkan kualitas Laporan Keuangan dapat ditingkatkan kualitasnya yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta II didirikan sebagai salah satu bagian integral dari Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan mempunyai peranan yang strategis dalam pengembangan dan penyelamatan usaha perikanan di

Indonesia. Upaya perlindungan sumberdaya ikan di Indonesia dari ancaman Hama Penyakit Ikan berbahaya dilakukan melalui kegiatan tindakan karantina ikan terhadap media pembawa hama penyakit ikan di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran di seluruh Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : PER.25/MEN/2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan.

Untuk mewujudkan tujuan diatas Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta II berkomitmen dengan :

**VISI:**

"Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional".

**MISI :**

"Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan kepada KKP dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka terdapat tiga pilar yang menjadi misi KKP yakni :

1. **Kedaulatan (Sovereignty)**, yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. **Keberlanjutan (Sustainability)**, yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan;
3. **Kesejahteraan (Prosperity)**, yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

**TUJUAN :**

Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah :

**Kedaulatan (Sovereignty)**, yakni :

1. Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan;
2. Mengembangkan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan

**Keberlanjutan (Sustainability)**, yakni :

1. Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati laut ;
2. Meningkatkan keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan budidaya;
3. Meningkatkan daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan.

**Kesejahteraan (Prosperity)**, yakni :

1. Mengembangkan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat
2. Mengembangkan inovasi iptek kelautan dan perikanan

**SASARAN STRATEGIS :**

1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kelautan dan Perikanan;
2. Meningkatnya ketersediaan produk Kelautan dan Perikanan;
3. Meningkatnya hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan;
4. Terselenggaranya modernisasi sistem produksi Kelautan dan Perikanan, pengolahan dan pemasaran produk Kelautan dan Perikanan yang optimal dan bermutu;
5. Terselenggaranya pengendalian, pengawasan terkait

- dengan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan serta penegakan hukum di bidang karantina ikan;
6. Tersedianya Sumber Daya Manusia Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta II yang kompeten dan professional;
  7. Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta II;
  8. Terwujudnya *good governance & clean government* di Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta II;
  9. Terkelolanya anggaran Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta II secara optimal.

Pendekatan  
penyusunan  
laporan  
keuangan

#### A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan untuk Periode 30 Desember Tahun Anggaran 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta II. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan

informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis  
Akuntansi

### A.3. Basis Akuntansi

BALAI KIPM JAKARTA II menerapkan basis akrual dalam Penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Basis Kas untuk Penyusunan dan Penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis Akrual adalah Basis Akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan Basis Kas adalah Basis akuntansi yang mengakui adanya transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar  
Pengukuran

### A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos dalam Laporan Keuangan. Dasar Pengukuran yang diterapkan **Kantor BALAI KIPM JAKARTA II** dalam penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumberdaya Ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh Aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumberdaya ekonomi yang digunakan Pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan  
Akuntansi

### A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah

mengacu pada Standard Akutansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akutansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan. Kebijakan akutansi yang diterapkan dalam Laporan Keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari *Satker* BALAI KIPM JAKARTA II Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan Akutansi yang penting dan digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan *Satker*. BALAI KIPM JAKARTA II adalah sebagai berikut :

Pendapatan

LRA

**(1) Pendapatan-LRA**

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada KasUmum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan

LO

**(2) Pendapatan-LO**

- Pendapatan-LO Adalah hak Pemerintah Pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode Tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan di realisasi, yaitu

adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut :

- Pendapatan jasa pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan;
  - Pendapatan sewa gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa;
  - Pendapatan denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akutansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
  - Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

#### Belanja

#### (3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

**(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode Pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban di akui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

**(5) Aset**

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

**a. Aset Lancar**

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

#### Aset Tetap

#### b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - (a). Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- (b). Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- (c). Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Piutang  
Jangka  
Panjang

### **c. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh

negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

*Aset Lainnya*

**d. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

*Kewajiban*

**(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumberdaya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

**a. Kewajiban Jangka Pendek**

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima Dimuka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas Dana

**(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode.

Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penyisihan  
Piutang Tak  
Tertagih

**(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih**

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih .

Tabel 3

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%

Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan  Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

Penyusutan  
Aset Tetap

**(9) Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No.90/PMK.06/2014 tentang penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Implementasi  
akuntansi  
berbasis akrual  
pertama kali

**(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali**

Mulai tahun 2010 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2023 yang berbasis *cash to ward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2023 adalah merupakan implementasi yang pertama.

**B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Selama periode berjalan, **Kantor BALAI KIPM JAKARTA II** telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah, penambahan dana APBNP dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat

pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	2023	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
<b>Pendapatan</b>		
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standardisasi Lainnya	9.784.845.000	9.784.845.000
Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	45.000.000	45.000.000
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	-	-
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>9.829.845.000</b>	<b>9.829.845.000</b>
<b>Belanja</b>		
Belanja Pegawai	7.632.726.000	7.768.606.000
Belanja Barang	6.602.414.000	6.602.414.000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Belanja Modal	531.235.000	531.235.000
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>14.766.375.000</b>	<b>14.902.255.000</b>

Realisasi  
Pendapatan  
n Negara  
dan Hibah  
Rp.11.285.5  
28.826,-

## B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar **Rp.11.285.528.826,-** atau mencapai **114,81 persen** dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar **Rp.9.829.845.000,-**. Keseluruhan Pendapatan Kantor BALAI KIPM JAKARTA II terdiri dari Pendapatan sensor/karantina, dan realisasinya adalah sebagai berikut :

### Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
1. Pendapatan Pungutan Hasil Perikanan	-	-	#DIV/0!
2. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	107.748.826	#DIV/0!
3. Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standardisasi Lainnya	9.784.845.000	11.119.980.000	113,64
4. Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	45.000.000	57.800.000	128,44
5. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	#DIV/0!
6. Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	#DIV/0!
7. Pendapatan Anggaran Lain-Lain	-	-	#DIV/0!
<b>Jumlah</b>	<b>9.829.845.000</b>	<b>11.285.528.826</b>	<b>114,81</b>

Realisasi Pendapatan Jasa (sensor/Karantina Ikan) TA.2023 mengalami Peningkatan sebesar 114,81% dibandingkan periode

TA.2022. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya pelayanan (Jasa) Karantina Ikan yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Kantor BALAI KIPM JAKARTA II. Terdapat adanya :

1. Realisasi Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp.107.748.826,-. Hal ini disebabkan adanya lelang kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 Balai KIPM Jakarta II
2. Realisasi Pendapatan Pengujian Sertifikasi, Kalibrasi dan Standardisasi Lainnya sebesar Rp.11.119.980.000,-.
3. Realisasi Pendapatan dari Penjualan Jasa Karantina Perikanan sebesar Rp.57.800.000,-.

**Perbandingan Realisasi Pendapatan TA.2023 dan 2022**

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2023	REALISASI 31 DESEMBER 2022
1. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	-
2. Pendapatan Pungutan Hasil Perikanan	-	-
3. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	107.748.826	16.000.000
4. Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	11.119.980.000	9.893.120.000
5. Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	57.800.000	57.560.000
6. Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain.	-	-
7. Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.	-	-
8. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	22.732.820
9. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	1.800.000
10. Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	1.086.093
11. Pendapatan Lain-Lain	-	-
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>11.285.528.826</b>	<b>9.992.298.913</b>

Realisasi  
Belanja  
Negara  
Rp.14.811.041.  
544,-

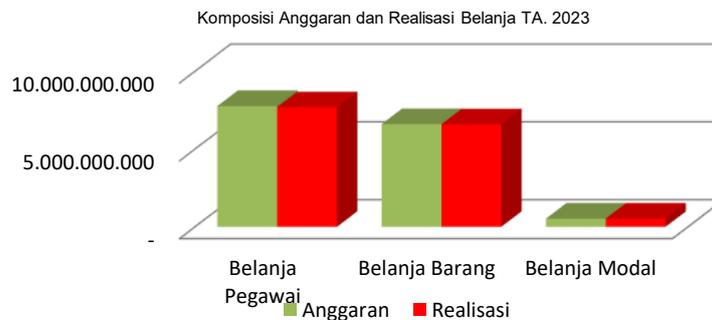
## B.2. Belanja

Realisasi Belanja Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta II pada **TA.2023** adalah sebesar **Rp.14.811.041.544,-** atau sebesar **99,39 persen** dari anggarannya sebelum dikurangi pengembalian belanja. Anggaran belanja Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta II per **TA.2023** adalah sebesar **Rp.14.902.255.000,-**. Rincian Anggaran dan realisasi belanja TA.2023 adalah sebagai berikut :

### Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA.2023

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Pegawai	7.768.606.000	7.687.825.495	98,96
Belanja Barang	6.602.414.000	6.592.316.153	99,85
Belanja Modal	531.235.000	530.899.896	99,94
Bantuan Sosial	0	0	0
<b>Total Belanja Kotor</b>	<b>14.902.255.000</b>	<b>14.811.041.544</b>	<b>99,39</b>
Pengembalian Belanja	-	-	-
<b>Belanja Netto</b>	<b>14.902.255.000</b>	<b>14.811.041.544</b>	<b>99,39</b>

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Dibandingkan dengan TA.2022, Realisasi Belanja Periode TA.2023 mengalami penurunan sebesar 2,52% dibandingkan realisasi belanja

pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya anggaran belanja modal yang diturunkan pada tahun 2023.

**Perbandingan realisasi Belanja TA.2023 dan 2022**

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 2023	TA. 2022	REALISASI 2022	TA. 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	7.687.825.495		7.558.919.919		1,71
Belanja Barang	6.592.316.153		6.635.104.873		(0,64)
Belanja Modal	530.899.896		999.498.300		(46,88)
Bantuan Sosial	-		-		-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>14.811.041.544</b>		<b>15.193.523.092</b>		<b>(2,52)</b>

Belanja  
Pegawai  
Rp.7.687.825.4  
95,-

**B.3 Belanja Pegawai**

Realisasi Belanja Pegawai **TA.2023** dan **TA.2022** adalah masing-masing sebesar **Rp.7.687.825.495,-** dan **Rp.7.558.919.919,-**. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA.2023 dengan TA.2022 mengalami kenaikan sebesar 1,71% dikarenakan adanya penambahan kenaikan belanja gaji pegawai Balai KIPM Jakarta II.

Perbandingan Belanja Pegawai TA.2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA. 2023	REALISASI TA. 2022	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	7.476.586.535	7.335.392.919	1,92
Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	0	0	#DIV/0!
Belanja Honorarium	0	0	#DIV/0!
Belanja Lembur	211.239.000	223.527.000	(5,50)
Belanja Vakasi	-	-	#DIV/0!
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>7.687.825.535</b>	<b>7.558.919.919</b>	<b>1,71</b>
Pengembalian Belanja Pegawai	(40)	-	#DIV/0!
<b>Jumlah Belanja Bersih</b>	<b>7.687.825.495</b>	<b>7.558.919.919</b>	<b>1,71</b>

Belanja  
Barang  
Rp.6.592.316.  
153,-

**B.4 Belanja Barang**

Realisasi Belanja Barang per **TA.2023** dan **TA.2022** adalah masing-masing sebesar **Rp.6.592.316.153,-** dan **Rp.6.635.104.873,-**.

Realisasi Belanja Barang TA.2023 mengalami penurunan sebesar **0,64%** dari Realisasi Belanja Barang TA.2022. Hal ini antara lain disebabkan oleh banyaknya belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas untuk kegiatan sesuai dengan tupoksi Karantina Ikan sepanjang tahun 2023.

Perbandingan Belanja Barang TA.2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA. 2023	REALISASI TA. 2022	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	2.054.125.082	2.208.012.159	(6,97)
Belanja Barang Non Operasional	450.113.480	287.679.651	56,46
Belanja Barang Persediaan	1.030.583.817	1.275.016.477	(19,17)
Belanja Jasa	1.138.135.682	1.016.711.877	11,94
Belanja Pemeliharaan	801.171.102	745.850.062	7,42
Belanja Barang Konsumsi	-	-	#DIV/0!
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.119.241.990	1.101.834.647	1,58
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>6.593.371.153</b>	<b>6.635.104.873</b>	<b>(0,63)</b>
Pengembalian Belanja	(1.055.000)	-	#DIV/0!
<b>Jumlah Belanja Bersih</b>	<b>6.592.316.153</b>	<b>6.635.104.873</b>	<b>(0,64)</b>

Belanja  
Modal  
Rp.530.899.8  
96,-

**B.5 Belanja Modal**

Realisasi Belanja Modal TA.2023 dan TA.2022 adalah masing-masing sebesar **Rp.530.899.896,-** dan **Rp.999.498.300,-**. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal periode TA.2023 mengalami penurunan sebesar **46,88%** dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA.2022. Hal ini disebabkan antara lain: adanya anggaran belanja modal yang dikurangi.

**Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA.2023 dan TA.2022**

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA. 2023	REALISASI TA. 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	530.899.896	999.498.300	-46,88
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Lainnya	0	0	#DIV/0!
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>530.899.896</b>	<b>999.498.300</b>	<b>-46,88</b>
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>530.899.896</b>	<b>999.498.300</b>	<b>-46,88</b>

Belanja  
Modal Tanah  
Rp. 0,-

**B.5.1 Belanja Modal Tanah**

Realisasi Belanja Modal Tanah periode TA.2023 dan periode TA.2022 adalah masing-masing sebesar **Rp.0,-** dan **Rp.0,-**.

**Perbandingan Belanja Modal Tanah TA.2023 dan TA.2022**

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA. 2023	REALISASI TA. 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	#DIV/0!
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>

Belanja  
Modal  
Peralatan  
dan Mesin  
Rp.530.899.  
896,-

**B.5.2 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin**

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin periode TA.2023 dan periode TA.2022 adalah masing-masing sebesar **Rp.530.899.896,-** dan **Rp.999.498.300,-** dan mengalami penurunan sebesar 46,88% bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada TA.2022. Hal ini

disebabkan karena adanya pengurangan belanja modal peralatan dan mesin.

**Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin  
TA.2023 dan TA.2022**

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA. 2023	REALISASI TA. 2022	Naik (Turun) %
Alat Bantu	Rp -	Rp 6.545.000	#DIV/0!
Alat Ukur	Rp -	Rp -	#DIV/0!
Alat Kantor	Rp -	Rp -	#DIV/0!
Alat Rumah Tangga	Rp -	Rp 125.485.000	#DIV/0!
Alat Studio	Rp -	Rp 68.472.450	#DIV/0!
Peralatan Pemancar	Rp -	Rp -	#DIV/0!
Alat Kesehatan Umum	Rp -	Rp 1.310.000	#DIV/0!
Unit Alat Laboratorium	Rp -	Rp 352.473.700	#DIV/0!
Alat Laboratorium Fisika/Elektronika	Rp -	Rp -	#DIV/0!
Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi	Rp 338.400.000	Rp 398.852.150	-17,86
Alat Khusus	Rp -	Rp -	#DIV/0!
Komputer Unit	Rp 182.600.000	Rp -	100,00
Peralatan Komputer	Rp 9.899.896	Rp 46.360.000	-368,29
Alat Angkutan Darat Bermotor	Rp -	Rp -	#DIV/0!
Alat Pengolahan	Rp -	Rp -	#DIV/0!
Alat Komunikasi	Rp -	Rp -	#DIV/0!
Pengembangan Mobil Pickup	Rp -	Rp -	#DIV/0!
Dst.....	Rp -	Rp -	#DIV/0!
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>Rp 530.899.896</b>	<b>Rp 999.498.300</b>	<b>-88,26</b>
Pengembalian	Rp -	Rp -	0,00
<b>Jumlah Belanja Bersih</b>	<b>Rp 530.899.896</b>	<b>Rp 999.498.300</b>	<b>0,00</b>

Belanja  
Modal  
Gedung  
dan  
bangunan  
Rp.0,-

**B.5.3. Belanja Modal Gedung Dan Bangunan**

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA.2023 dan TA.2022 adalah masing-masing sebesar **Rp.0,-** dan **Rp.0,-**. Adanya belanja Modal Gedung dan bangunan berupa penambahan nilai gedung dan bangunan pada periode TA.2023 ini.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal  
Gedung dan Bangunan TA.2023 dan TA.2022

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA. 2023	REALISASI TA. 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Fisik Lainnya	0	0	#DIV/0!
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0.00
<b>Jumlah Belanja Bersih</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>

Belanja  
Modal  
jalan, irigasi  
dan  
jaringan  
Rp. 0,-

**B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada TA.2023 dan TA.2022 adalah masing-masing sebesar **Rp.0,-** dan **Rp.0,-**.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan  
TA.2023 dan TA.2022

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA. 2023	REALISASI TA. 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Irigasi	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Jaringan	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Jalan	0	0	#DIV/0!
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
Pengembalian Belanja Modal	0	0	#DIV/0!
<b>Jumlah Belanja Bersih</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>

Belanja  
Modal  
lainnya Rp.  
0,-

**B.5.5 Belanja Modal Lainnya**

Realisasi Belanja Modal Lainnya pada TA.2023 dan TA.2022 adalah masing-masing sebesar **Rp.0,-** dan **Rp.0,-**. Adanya realisasi belanja modal lainnya berupa software pada periode TA.2023 ini.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan Lainnya  
TA.2023 dan TA.2022

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA. 2023	REALISASI TA. 2022	Naik (Turun) %
Software	0	0	#DIV/0!
	0	0	#DIV/0!
	0	0	#DIV/0!
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
Pengembalian Belanja Modal	0	0	#DIV/0!
<b>Jumlah Belanja Bersih</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>

Belanja  
Bantuan  
Sosial Rp.  
0,-

### B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp.0,-** dan **Rp.0,-**. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Realisasi tersebut pada TA.2023 mengalami kenaikan sebesar 0,00% dibandingkan TA.2022.

Belanja Bantuan Sosial yang disalurkan adalah dalam bentuk barang. Bantuan ini diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial yaitu rendahnya tingkat pendidikan yang disebabkan banyaknya daerah miskin.

#### Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA.2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI TA. 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
	0	0	#DIV/0!
	0	0	#DIV/0!
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
Pengembalian	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>

### C. PENJELASAN ATAS POS - POS NERACA

#### C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di  
Bendahara  
Pengeluaran  
Rp.0,-

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran TA.2023 dan TA.2022 adalah masing-masing sebesar **Rp.0,-** dan **Rp.0,-** yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

**Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran**

Keterangan	TA. 2023	TA. 2022
Uang Tunai	-	-
Uang Muka	-	-
Kuitansi yang belum di SP2D kan	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Kas di  
Bendahara  
Penerimaan  
Rp.0,-

**C.2 Kas di Bendahara Penerimaan**

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal TA.2023 dan TA.2022 adalah sebesar masing-masing **Rp.0,-** dan **Rp.0,-**. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

**Rincian Kas di Bendahara Penerimaan**

Keterangan	TA. 2023	TA 2022
	-	-
	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Kas Lainnya  
dan Setara  
Kas Rp.0,-

**C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas**

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal TA.2023 dan TA.2022 masing-masing sebesar **Rp.0,-** dan **Rp.0,-**.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

**Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas**

Jenis	TA. 2023	TA. 2022
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	0
Jasa Giro yang belum disetor ke kas negara	-	0
Pajak PPh yang belum disetor	-	0
Honor kegiatan yang belum dibagikan	-	0
Pengembalian belanja belum disetor ke kas negara	-	0
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Piutang  
Bukan  
Pajak  
Rp.0,-

**C.4 Piutang PNBP**

Saldo Piutang PNBP per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp.0,-** dan **Rp.0,-**. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

**Rincian Piutang Bukan Pajak**

Uraian	TA. 2023	TA. 2022
Piutang PNBP	-	-
Piutang Lainnya	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Bagian  
Lancar  
Tagihan  
TP/TGR  
Rp.0,-

**C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal TA.2023 dan TA.2022 adalah masing-masing sebesar **Rp.0,-** dan **Rp.0,-**. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

**Rincian Bagian Lancar TP/TGR**

No	Nama	Tahun 2023	Tahun 2022
1		Rp -	Rp -
2		Rp -	Rp -
3		Rp -	Rp -
4		Rp -	Rp -
5		Rp -	Rp -
6		Rp -	Rp -
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>

Bagian  
Lancar TPA  
Rp.0,-

### C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal TA.2023 dan TA.2022 masing-masing adalah sebesar **Rp.0,-** dan **Rp.0,-**. Bagian Lancar TPA merupakan TPA yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang dengan rincian sebagai berikut:

#### Rincian Bagian Lancar TPA

No	Nama	TA. 2023	TA. 2022
1			-
2		-	-
3		-	-
4		-	-
5		-	-
<b>Jumlah</b>		-	-

Penyisihan  
Piutang Tak  
Tertagih –  
Piutang  
Jangka  
Pendek  
Rp.0,-

### C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Pendek

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Pendek TA. 2023 dan 2022 adalah sebesar **Rp.0,-** dan **Rp.0,-**.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Pendek adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Jangka Pendek pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

#### Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Jangka Pendek

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Piutang Bukan Pajak</b>			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
<b>Jumlah</b>	-	<b>0,00%</b>	-
<b>Bagian Lancar TP/TGR</b>			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
<b>Jumlah</b>	-	<b>0,00%</b>	-
<b>Bagian Lancar TPA</b>			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
<b>Jumlah</b>	-	<b>0,00%</b>	-
<b>Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih</b>	-	-	-

Belanja  
Dibayar di  
Muka Rp.0,-

### C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal TA.2023 dan TA.2022 masing-masing adalah sebesar **Rp.0,-** dan **Rp.0,-**. Belanja Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

#### Rincian Belanja Dibayar di Muka

Jenis	TA. 2023	TA. 2022
Pembayaran Internet	-	-
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	-	-
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Pendapatan  
yang  
Masih  
Harus  
Diterima  
Rp.0,-

### C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal TA.2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp.0,-** dan **Rp.0,-**.

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

#### Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima TA.2023 dan 2022

Jenis	TA. 2023	TA. 2022
Pendapatan Jasa Pelatihan	-	-
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Persediaan  
Rp.412.602.  
767,-

### C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp.412.602.767,-** dan **Rp.911.640.157,-**.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

**Rincian Persediaan**

Persediaan	31-Des-23	31-Des-22
Barang Konsumsi	349.350.419	605.713.079
Bahan untuk Pemeliharaan	139.000	16.180.000
Suku Cadang	4.442.658	58.487.168
Pita Cukai, Materai dan Leges	-	-
Bahan Baku	58.670.690	231.259.910
<b>Jumlah</b>	<b>412.602.767</b>	<b>911.640.157</b>

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tagihan  
TP/TGR  
Rp. 0,-

**C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP / TGR)**

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per TA.2023 dan TA.2022 masing-masing sebesar **Rp.0,-** dan **Rp.0,-**. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat melanggar hukum disiplin yang mengakibatkan kerugian negara.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal TA.2023 adalah sebagai berikut:

**Rincian Tagihan TP/TGR**

No	Debitur	TA. 2023	TA. 2022
1	Balai KIPM Jakarta II	-	-
2		-	-
3		-	-
4		-	-
5		-	-
6		-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

TPA  
Rp.0,-

### C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per TA.2023 dan TA.2022 adalah masing-masing sebesar **Rp.0,-** dan **Rp.0,-**. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian TPA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

#### Rincian Tagihan TPA

No	Debitur	TA. 2023	TA. 2022
1			
2			
3			
4			
5		-	
<b>Jumlah</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

Penyisihan  
Piutang Tak  
Tertagih -  
Piutang  
Jangka  
Panjang  
Rp.0,-

### C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Panjang per TA.2023 dan TA.2022 adalah masing-masing sebesar **Rp.0,-** dan **Rp.0,-**. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TPA.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

#### Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Jangka Panjang

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Tagihan TP/TGR</b>			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
<b>Tagihan PA</b>			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
<b>Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

Tanah  
Rp.10.118.0  
66.000,-

### C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor BALAI KIPM JAKARTA II per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp.10.118.066.000,-** dan **Rp.10.118.066.000,-**. Mutasi tambah

nilai tanah tersebut karena adanya koreksi pencatatan nilai oleh KPKNL dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022</b>	<b>10.118.066.000</b>
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Mutasi kurang:	
Penyitaan pengadilan	0
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>10.118.066.000</b>

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

**Rincian Tanah**

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	780 m2	Jl. Swasembada Timur XIII No.64, Tanjung Priok	10.118.066.000
2			
3			
			-
<b>Jumlah</b>			<b>10.118.066.000</b>

Peralatan  
dan Mesin  
Rp.16.359.3  
46.851,-

**C.15 Peralatan dan Mesin**

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah **Rp.16.359.346.851,-** dan **Rp.15.828.446.955,-**. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022</b>	<b>15.828.446.955</b>
Mutasi tambah:	
Pembelian	530.899.896
Reklasifikasi Masuk	164.833.896
Mutasi kurang:	
Reklasifikasi Keluar	164.833.896
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>16.359.346.851</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	0
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2023</b>	<b>16.359.346.851</b>

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa:

- Adanya pembelian belanja modal peralatan dan mesin senilai Rp.144.100.000,- berupa PC sebanyak 5 unit dan Laptop sebanyak 4 unit.

2. Adanya pembelian belanja modal peralatan dan mesin senilai Rp.44.966.000,- berupa Alat Pengolah Data sebanyak 1 Paket.
3. Adanya pembelian belanja modal peralatan dan mesin senilai Rp.3.433.896,- berupa Scanner dan Printer sebanyak 1 unit.
4. Adanya pembelian belanja modal peralatan dan mesin senilai Rp.259.900.000,- berupa Pengadaan Alat Laboratorium (Thermal Cyclor dan PCR Chamber) sebanyak 1 unit.
5. Adanya pembelian belanja modal peralatan dan mesin senilai Rp.78.500.000,- berupa Pengadaan Alat Laboratorium (AutoClave) sebanyak 1 unit.

Gedung  
dan  
Bangunan  
Rp.10.358.0  
49.540,-

#### C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah **Rp.10.358.049.540,-** dan **Rp.10.358.049.540,-**. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022</b>	<b>10.358.049.540</b>
Mutasi tambah: Pembangunan tambahan ruang kelas	-
Mutasi kurang: Koreksi Pencatatan	-
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>10.358.049.540</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	-
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2023</b>	<b>10.358.049.540</b>

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Jalan,  
Jaringan  
dan Irigasi  
Rp.316.816.  
000,-

#### C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp.316.816.000,-** dan **Rp.316.816.000,-**. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022</b>	<b>316.816.000</b>
Mutasi tambah: Penambahan jaringan tambah daya listrik	-
Mutasi kurang: Koreksi Pencatatan	-
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>316.816.000</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	-
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2023</b>	<b>316.816.000</b>

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap  
Lainnya  
Rp.0,-

### C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah **Rp.0,-** dan **Rp.0,-**. Aset tetap tersebut berupa monografi, laporan, audio visual lainnya dan bahan kartografi lainnya. Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022</b>	<b>-</b>
Mutasi tambah: Pembelian	-
Mutasi kurang: Penghentian Aset dari Penggunaan	-
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>-</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	-
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2023</b>	<b>-</b>

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Konstruksi  
Dalam  
Pengerjaan  
Rp.0,-

### C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp.,-** dan **Rp.80.140.000,-**.

Akumulasi  
Penyusutan  
Aset Tetap  
Rp.(15.616.  
482.379,-)

### C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing **Rp.(15.616.482.379,-)** dan **Rp.(14.452.982.990,-)**. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

#### Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	16.359.346.851	14.291.005.164	2.068.341.687
2	Gedung dan Bangunan	10.358.049.540	1.262.649.026	9.095.400.514
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	316.816.000	62.828.189	253.987.811
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
<b>Akumulasi Penyusutan</b>		<b>27.034.212.391</b>	<b>15.616.482.379</b>	<b>11.417.730.012</b>

Aset Tak  
Berwujud  
Rp.349.800.  
000,-

### C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah **Rp.349.800.000,-** dan **Rp.349.800.000,-**.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset tak berwujud Balai KIPM Jakarta II berupa software. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022</b>	<b>349.800.000</b>
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>349.800.000</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(349.800.000)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2023</b>	<b>-</b>

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

**Rincian Aset Tak berwujud**

Uraian	Nilai
Software	349,800,000
	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>

Aset Tetap  
yang Tidak  
Digunakan  
Rp.0,-

**C.22 Aset Lain-Lain (Aset Tetap yang Tidak Digunakan)**

Saldo Aset Tetap yang Tidak Digunakan per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp.0,-** dan **Rp.0,-**. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022</b>	-
Mutasi tambah: Aset Tetap yang Tidak Digunakan	-
Mutasi kurang: Koreksi Pencatatan	-
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	-
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2023</b>	-

Rincian aset tetap yang tidak digunakan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi  
Penyusutan  
dan  
Amortisasi  
Aset  
Lainnya  
Rp.349.800.  
000,-

**C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing **Rp.349.800.000,-** dan **Rp.262.350.000,-**. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

**Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya**

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	349.800.000	349.800.000	0
Aset Lain-lain	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>349.800.000</b>	<b>349.800.000</b>	<b>0</b>

Uang Muka  
dari KPPN  
Rp.0,-

**C.24 Uang Muka dari KPPN**

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar **Rp.0,-** dan **Rp.0,-**. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

**Rincian Uang Muka dari KPPN**

Uraian	Jumlah
Uang Persediaan	-
Tambahan uang Persediaan	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

Utang  
kepada  
Pihak  
Ketiga  
Rp.38.787.8  
16,-

**C.25 Utang kepada Pihak Ketiga**

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar **Rp.38.787.816,-** dan **Rp.37.100.800,-**. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Kantor BALAI KIPM JAKARTA II per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

**Rincian Utang kepada Pihak Ketiga**

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	
Belanja barang yang masih harus dibayar	-	
Utang kepada Pihak ketiga lainnya	38.787.816	Tagihan Listrik dan Telkom Desember 2023 yang belum dibayar
<b>Total</b>	<b>38.787.816</b>	

Utang Yang  
Belum  
Ditagihkan  
Rp.0,-

**C.26 Utang Yang Belum Ditagihkan**

Nilai Utang yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar **Rp.0,-** dan **Rp.0,-**.

Adapun rincian Utang Yang Belum Ditagihkan pada Kantor BALAI KIPM JAKARTA II per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

**Rincian Utang Yang Belum Ditagihkan**

No	Uraian	Jumlah
1	Pengadaan Bahan Laboratorium	-
2	Listrik	-
3	Telkom	-
4	PAM	-
5	Perpanjangan STNK	-
6	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 dan Roda 4	-
7	Pemeliharaan Printer dan Laptop/PC	-
8	Keperluan Perkantoran	-
9	Penambah Daya Tahan Tubuh	-
10	Perjadin	-
11	Persediaan Bahan Laboratorium	-
12	Belanja Bahan	-
13	Pengiriman Pos	-
14	Layanan Sampah	-
<b>JUMLAH</b>		<b>-</b>

Utang  
Jangka  
Pendek  
Lainnya

**C.27 Utang Jangka Pendek Lainnya**

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar **Rp.0,-** dan **Rp.0,-**. Utang

Rp.0,-

Jangka Pendek Lainnya merupakan pajak yang belum disetorkan ke kas negara. Adapun rincian Utang Jangka Pendek Lainnya pada Kantor BALAI KIPM JAKARTA II per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

**Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya**

Uraian	Realisasi TA. 2023	Realisasi TA. 2022
Pajak yang belum disetor	-	-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Pendapatan yang ditangguhkan  
Rp.0,-

**C.28 Pendapatan yang Ditangguhkan**

Nilai Pendapatan Ditangguhkan per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp.0,-** dan **Rp.0,-**. Pendapatan yang Ditangguhkan merupakan pendapatan negara yang belum disetorkan ke Kas Negara pada tanggal pelaporan. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan PNBPN, pengembalian belanja, serta pungutan/potong pajak yang belum disetorkan ke kas negara pada tanggal 31 Desember 2023.

Rincian Pendapatan yang Ditangguhkan pada Kantor BALAI KIPM JAKARTA II per tanggal pelaporan disajikan sebagai berikut:

**Rincian Pendapatan yang Ditangguhkan**

Uraian	Jumlah
Pendapatan PNBPN	-
PPH yang belum disetor	-
<b>Total</b>	<b>-</b>

Pendapatan Diterima di Muka  
Rp.0,-

**C.29 Pendapatan Diterima di Muka**

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 sebesar **Rp.0,-** dan **Rp.0,-**. Pendapatan Diterima

di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun. Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan sebagai berikut:

**Rincian Pendapatan Diterima Di Muka**

Uraian	Jumlah
<b>Total</b>	<b>-</b>

Beban  
yang Masih  
harus  
Dibayar  
Rp.38.787.8  
16,-

**C.30 Beban yang Masih Harus Dibayar**

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 sebesar **Rp.38.787.816,-** dan **Rp.37.100.800,-** merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut:

**Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar  
TA.2023 dan TA.2022**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	38.787.816	37.100.800
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	-	-
<b>Total</b>	<b>38.787.816</b>	<b>37.100.800</b>

Ekuitas  
Rp.21.909.6  
10.963,-

**C.31 Ekuitas**

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp.21.909.610.963,-** dan **Rp.23.210.524.862,-**. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

**D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**

**D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Pendapatan  
PNBP  
Rp.11.285.528.826,-

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada Tahun Anggaran 2023 dan Tahun 2022 adalah sebesar **Rp.11.285.528.826,-** dan **Rp.9.992.298.913,-**. Pendapatan tersebut terdiri dari:

**Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA. 2023 dan 2022**

URAIAN	TA.2023	TA.2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	-	#DIV/0!
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	107.748.826	16.000.000	5,73
Pendapatan Pengujian Sertifikasi, Kalibrasi dan Standardisasi Lainnya	11.119.980.000	9.893.120.000	0,12
Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	57.800.000	57.560.000	0,00
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	-	#DIV/0!
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan	-	-	#DIV/0!
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	-	-	#DIV/0!
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	-	22.732.820	(1,00)
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	-	1.800.000	(1,00)
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	-	1.086.093	(1,00)
Pendapatan Lain-lain	-	-	#DIV/0!
<b>Jumlah</b>	<b>11.285.528.826</b>	<b>9.992.298.913</b>	<b>0,13</b>

Pendapatan Jasa merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari Pendapatan/Jasa Sensor Karantina Ikan.

**D.2 Beban Pegawai**

Beban  
Pegawai  
Rp.7.687.825.495,-

Jumlah Beban Pegawai pada TA.2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp.7.687.825.495,-** dan **Rp.7.558.919.919,-**. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

**Rincian Beban Pegawai Tahun 2023 dan 2022**

URAIAN JENIS BEBAN	TA. 2023	TA. 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	3.880.462.728	3.905.533.869	(0,01)
Beban Tunjangan-Tunjangan	3.596.123.767	3.429.859.050	0,04848
Beban Honorarium dan Vakasi	-	-	-
Beban Lembur	211.239.000	223.527.000	-
<b>Jumlah</b>	<b>7.687.825.495</b>	<b>7.558.919.919</b>	<b>0,02</b>

Beban  
Persediaan  
Rp.1.585.618.  
697,-

**D.3 Beban Persediaan**

Jumlah Beban Persediaan pada TA.2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp.1.585.618.697,-** dan **Rp.689.085.475,-**. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang - barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk TA.2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Persediaan TA. 2023 dan 2022**

URAIAN JENIS BEBAN	TA.2023	TA.2022	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	977.206.360	594.139.970	0,64
Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	-	-	#DIV/0!
Beban Bahan Baku	608.412.337	94.945.505	5,41
Suku Cadang	-	-	#DIV/0!
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-	-	#DIV/0!
Bahan untuk pemeliharaan	-	-	#DIV/0!
<b>Jumlah Beban Persediaan</b>	<b>1.585.618.697</b>	<b>689.085.475</b>	<b>1,30</b>

Beban  
Barang dan  
Jasa  
Rp.3.643.006.  
260,-

#### D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa TA.2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp.3.643.006.260,-** dan **Rp.3.520.650.402,-**. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk TA.2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

##### Rincian Beban Barang dan Jasa TA. 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TA.2023	TA.2022	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	1.519.475.282	1.573.302.759	-0,03
Beban Penambah Daya tahan tubuh	191.496.800	215.421.800	-0,11
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	251.500	69.000	2,64
Beban Honor Output Satuan Kerja	189.545.000	187.350.000	0,01
Beban Barang Operasional Lainnya	153.301.500	163.536.500	-0,06
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	68.332.100	-1,00
Beban Bahan	416.453.480	264.534.651	0,57
Beban Honor Output Kegiatan	8.160.000	8.160.000	0,00
Beban Barang Non Operasional lainnya	4.500.000	-	#DIV/0!
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	20.000.000	14.985.000	0,33
Beban Langganan Daya dan Jasa	510.354.736	457.740.694	0,11
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	7.650.000	14.725.136	-0,48
Beban Sewa	94.280.126	65.984.815	0,43
Beban Jasa Profesi	31.000.000	25.200.000	0,23
Beban Jasa Lainnya	496.537.836	451.170.297	0,10
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	-	3.812.700	-1,00
Belanja Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	-	6.324.950	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>3.643.006.260</b>	<b>3.520.650.402</b>	<b>0,03</b>

Beban  
Pemeliharaan  
Rp.879.224.612,  
-

#### D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan TA.2023 dan TA.2022 adalah masing-masing sebesar **Rp.879.224.612,-** dan **Rp.746.607.794,-**. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk TA.2023 dan TA.2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA.2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TA.2023	TA.2022	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	317.029.826,00	284.371.795,00	0,11
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	484.141.276,00	461.478.267,00	0,05
Beban Pemeliharaan jaringan	-	-	-
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	19.430.000,00	210.000,00	0,00
Beban Persediaan Suku Cadang	58.623.510,00	547.732,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>879.224.612,00</b>	<b>746.607.794,00</b>	<b>0,18</b>

Beban  
Perjalanan  
Dinas  
Rp.1.119.241.  
990,-

**D.6. Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas TA.2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp.1.119.241.990,-** dan **Rp.1.101.834.647,-**. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk TA.2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA.2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TA.2023	TA.2022	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	376.283.699,00	887.578.625,00	(0,58)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	495.151.479,00	104.330.000,00	3,75
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7.130.000,00	-	#DIV/0!
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID	-	-	#DIV/0!
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	240.676.812,00	109.926.022,00	1,19
<b>Jumlah</b>	<b>1.119.241.990,00</b>	<b>1.101.834.647,00</b>	<b>0,02</b>

Beban  
Barang  
untuk  
Diserahkan  
kepada  
Masyarakat  
Rp.0,-

**D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat**

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA.2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp.0,-** dan **Rp.0,-**. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2023.

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat  
TA.2023 dan 2022**

URAIAN JENIS BEBAN	TA.2023	TA.2022	NAIK (TURUN) %
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-	-
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-	-
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Beban  
Bantuan  
Sosial Rp.0,-

**D.8 Beban Bantuan Sosial**

Beban Bantuan Sosial TA.2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp.0,-** dan **Rp.0,-**. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Bantuan Sosial TA.2023 dan 2022**

URAIAN JENIS BEBAN	TA. 2023	TA. 2022	% NAIK (TURUN)
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	-	-	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	-	-	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Beban  
Penyusutan  
dan  
Amortisasi  
Rp.1.250.949.  
389,-

**D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk TA.2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp.1.250.949.389,-** dan **Rp.1.565.213.461,-**. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk TA.2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA.2023 dan 2022

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TA.2023	TA.2022	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	919.461.363	1.233.725.435	(0,34)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	233.467.968	233.467.968	-
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	10.570.058	10.570.058	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	#DIV/0!
<b>Jumlah Penyusutan</b>	<b>1.163.499.389</b>	<b>1.477.763.461</b>	<b>(0,27)</b>
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	87.450.000	87.450.000	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	#DIV/0!
<b>Jumlah Amortisasi</b>	<b>87.450.000</b>	<b>87.450.000</b>	<b>-</b>
<b>Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>1.250.949.389</b>	<b>1.565.213.461</b>	<b>(0,25)</b>

Beban  
Penyisihan  
Piutang Tak  
Tertagih  
Rp.0.-

**D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih**

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk TA.2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp.0,-** dan **Rp.0,-**. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk TA. 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih TA. 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TA. 2023	TA. 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jk Pendek	-	-	#DIV/0!
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jk Panjang	-	-	#DIV/0!
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>

Beban Lain -  
lain Rp.0,-

**D.11 Beban Lain-lain**

Jumlah Beban Lain-lain untuk TA.2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp.0,-** dan **Rp.0,-**. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk TA.2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Lain-lain TA.2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TA.2023	TA.2022	NAIK (TURUN) %
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	-	-	#DIV/0!
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	-	-	#DIV/0!
Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya	-	-	#DIV/0!
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>

Surplus  
/Defisit dari  
Kegiatan  
Non  
Operasional  
Rp.27.608.82  
6,-

**D.12 Kegiatan Non Operasional**

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional TA.2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA.2023 dan 2022

URAIAN	TA.2023	TA.2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	-	-	#DIV/0!
Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional	27.608.826	38.109.160	(0)
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	-	-	#DIV/0!
Penjualan Alat Kantor	-	-	#DIV/0!
Defisit Selisih Kurs	-	-	#DIV/0!
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>27.608.826</b>	<b>38.109.160</b>	<b>(0)</b>

Pos Luar  
Biasa Rp.0,-

**D.13 Pos Luar Biasa**

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk TA.2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa TA.2023 dan 2022

URAIAN	TA.2023	TA.2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNPB	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas	-	-	-
Beban Persediaan	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## E . PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal  
Rp.23.210.52  
4.862,-

### E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp.23.210.524.862,-** dan **Rp.23.040.763.341,-**.

Defisit LO  
(Rp.4.960.477  
.617,-)

### E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada TA.2023 dan 2022 adalah sebesar **(Rp.4.960.477.617,-)** dan **(Rp.5.269.740.858,-)**. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Dampak  
Kumulatif  
Perubahan  
Kebijakan  
Akuntansi/Kesalahan  
Mendasar  
Rp.0,-

### E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp.0,-**.

Penyesuaian  
Nilai Aset  
Rp.0,-

### E.4 Koreksi yang Menambah / Mengurangi Ekuitas

#### E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada Tahun Anggaran 2023 dan 2022 adalah sebesar **Rp.0,-** dan **Rp.0,-**. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai  
Persediaan  
Rp.0,-

#### E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp.0,-** dan **Rp.131.974.857,-**. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk TA.2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	-
Bahan Untuk Pemeliharaan	-
Pita Cukai, Materai dan Leges	-
Bahan Baku	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

Koreksi Atas  
Reklasifikasi  
Rp.968.000,-

**E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi**

Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atas reklasifikasi persediaan/aset tetap/aset lainnya yang dihasilkan dari transaksi reklasifikasi masuk dan keluar BMN dari aplikasi persediaan dan aplikasi SIMAK BMN. Koreksi Atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada Tahun Anggaran 2023 dan 2022 adalah masing - masing sebesar **Rp.968.000,-** dan **Rp.0,-**.

Selisih  
Revaluasi  
Aset Tetap  
Rp.0,-

**E.4.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap**

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada Tahun Anggaran 2023 dan 2022 adalah masing - masing sebesar **Rp.0,-** dan **Rp.0,-**.

Koreksi Nilai  
Aset Tetap  
Non  
Revaluasi  
Rp.0,-

**E.4.5 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi**

Koreksi Nilai Aset Tetap Non untuk periode yang berakhir pada Tahun Anggaran 2023 dan 2022 adalah sebesar **Rp.0,-** dan **Rp.18.636.093,-**. Nilai Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi tersebut adalah koreksi nilai Gedung dan Bangunan.

Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Peralatan dan Mesin	-
Gedung dan Bangunan	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

Koreksi Lain-  
Lain Rp.0,-

#### E.4.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada Tahun Anggaran 2023 dan 2022 adalah sebesar **Rp.0,-** dan **Rp.0,-**. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari :

##### Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Pendapatan	-
Koreksi Beban	-
Koreksi Piutang	-
Koreksi Kewajiban	-
Koreksi Hibah	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

Transaksi  
Antar Entitas  
Rp.3.658.595.  
718,-

#### E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada Tahun Anggaran 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp.3.658.595.718,-** dan **Rp.5.288.891.429,-**. Transaksi antar entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

##### Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	14.811.041.544
Diterima dari Entitas Lain	(11.285.528.826)
Transfer Keluar	-
Transfer Masuk	133.083.000
Transaksi Pengelolaan Investasi BA BUN pada BLU	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Setoran Surplus BLU	-
<b>Jumlah</b>	<b>3.658.595.718</b>

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

#### E.5.1 Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)/Diterima dari Entitas Lain (DDEL)

Ditagihkan ke Entitas Lain/Diterima dari Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2023, DKEL sebesar **Rp.14.811.041.544,-** sedangkan DDEL sebesar (**Rp.11.285.528.826,-**).

#### E.5.2 Transfer Keluar/Transfer Masuk

Transfer Keluar/Transfer Masuk merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antar KL dengan BA-BUN.

Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar **Rp.0,-** yang merupakan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin dikarenakan adanya kesalahan dalam pencatatan pembelian yang awalnya dicatat di alat kepolisian yang seharusnya di peralatan dan mesin.

Sedangkan transfer masuk merupakan perpindahan sertifikat KID sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar **Rp.133.083.000,-** terdiri dari :

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	Barang Konsumsi	KID	Rp 133.083.000,00
2	Bahan untuk Pemeliharaan		Rp -
3	Suku Cadang		Rp -
4	Pita Cukai, Materai dan Leges	HC	Rp -
<b>Jumlah</b>			<b>Rp 133.083.000,00</b>

#### E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang mauun jasa, sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar **Rp.0,-** dari total **Rp.0,-** yang diterima sepanjang Tahun 2023.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan

transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp.0,-**.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1			Rp -
2			Rp -
<b>Total Pengesahan</b>			<b>Rp -</b>
<b>Pengesahan Pengembalian Hibah</b>			<b>Rp -</b>
<b>Jumlah</b>			<b>Rp -</b>

Ekuitas Akhir  
Rp.21.909.610.963,-

#### E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp.21.909.610.963,-** dan **Rp.23.210.524.862,-**.

### F . PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

#### F.1. KEJADIAN - KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada kejadian-kejadian penting yang menyebabkan perubahan setelah tanggal neraca di laporkan.

#### F.2. PENGUNGKAPAN LAIN - LAIN

Ada beberapa hal yang akan Balai KIPM Jakarta II ungkapkan, antara lain:

1. Terdapat SK Pengelola Anggaran dengan Nomor SK No.B.1/KPA/BKIPM.JKT.II/KU.110/I/2023 tanggal 16 Januari 2023.
2. Terdapat SK Pengelola Sistem Akuntansi Pemerintah (UAKPA/BARANG) dengan Nomor SK No.B.2/KPA/BKIPM.JKT.II/KU.110/I/2023 tanggal 16 Januari 2023.
3. Terdapat SK Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dengan Nomor SK No.B.49/BKIPM.JKT.II/KPA/KU.110/III/2023 tanggal 17 Maret 2023.
4. Terdapat SK Pengelola PNBP dengan Nomor SK No.B.65/KPA/BKIPM.JKT.II/KU.110/III/2023 tanggal 01 Maret 2023.
5. Adanya transfer masuk dari Sekretariat Badan berupa Sertifikat Kesehatan Ikan (KID) senilai Rp.2.873.750,- dan Pita Cukai, Materai dan Leges senilai Rp.45.647.250,-.

6. Terdapat Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp.80.140.000,00, berupa Belanja Jasa Konsultan Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan, dan telah dilakukan penghapusan sesuai dengan SK Penghapusan KDP Nomor 406/KEPMEN-KP/SJ/PL.750/2023 tanggal 14 Juni 2023.
7. Terdapat Pendapatan di Tahun Anggaran 2023 ini, yang merupakan Pendapatan dari Penjualan BMN (Pendapatan Lelang Kendaraan Dinas Roda 2 dan Roda 4) senilai Rp.107.748.826,-, Pendapatan Pengujian Sertifikasi, Kalibrasi dan Standardisasi Lainnya senilai Rp.11.119.980.000,- dan Pendapatan Jasa Karantina Perikanan senilai Rp.57.800.000,-.
8. Terdapat Persediaan senilai Rp.412.602.767,- merupakan barang habis pakai berupa barang konsumsi senilai Rp.570.364.513,-, bahan untuk pemeliharaan senilai Rp.764.000,-, suku cadang senilai Rp.24.090.808,-, dan Bahan Baku senilai Rp.468.417.946,- dan juga telah terdapat Berita Acara Stock Opname Persediaan.
9. Terdapat Aset Tak Berwujud senilai Rp.349.800.000,- berupa Aplikasi Penerbitan HC Eksport (Spectraline).
10. Utang kepada pihak ketiga senilai Rp.38.787.816,- berupa Tagihan Listrik Swasembada & Enggano senilai Rp.30.595.583,-, Listrik Muara Baru senilai Rp.2.134.052,-, Telkom Swasembada & Enggano senilai Rp.5.987.794,- dan Telkom Muara Baru senilai Rp.70.387,-.
11. Adanya belanja modal yang bersumber dari dana PNBPN berupa Pengadaan Laptop dan PC sebesar Rp.144.100.000, dengan SPK No.2.8/15.0/PL.410/III/2023 Tanggal 08 Maret 2023, SPM No.00106T tanggal 17 Mei 2023 dan SP2D No. 231751701002902 tanggal 17 Mei 2023.
12. Adanya belanja modal yang bersumber dari dana PNBPN berupa Pengadaan PC dan Printer sebesar Rp.44.966.000, dengan Kwitansi No.KWI/PSU/2023/05/0203 Tanggal 29 Mei 2023, SPM No.00119T tanggal 06 Juni 2023 dan SP2D No.231751301021929 tanggal 08 Juni 2023.
13. Adanya belanja modal yang bersumber dari dana PNBPN berupa

- Pengadaan Scanner dan Printer sebesar Rp.3.433.896, dengan Kwitansi No.KWI/PSU/2023/05/0202 Tanggal 08 Juni 2023, SPM No.00130T tanggal 16 Juni 2023 dan SP2D No.231751301024510 tanggal 20 Juni 2023.
14. Adanya belanja barang yang bersumber dari dana PNBPN berupa Pembelian Cetakan Perkantoran sebesar Rp.49.900.000, dengan Kwitansi No.18.01/pmd/23 Tanggal 18 Januari 2023, SPM No.00014T tanggal 26 Januari 2023 dan SP2D No.231751301000767 tanggal 30 Januari 2023.
  15. Adanya belanja barang yang bersumber dari dana PNBPN berupa Pembelian Bahan Laboratorium sebesar Rp.3.611.000, dengan Kwitansi No.024/JKUMK/II/2023 Tanggal 09 Februari 2023, SPM No.00061T tanggal 29 Maret 2023 dan SP2D No.231751302007815 tanggal 31 Maret 2023.
  16. Adanya belanja barang yang bersumber dari dana PNBPN berupa Pembelian Bahan Laboratorium sebesar Rp.6.869.790, dengan Kwitansi No.0006/TP/III/2023 Tanggal 27 Maret 2023, SPM No.00060T tanggal 29 Maret 2023 dan SP2D No.231751302007810 tanggal 31 Maret 2023.
  17. Adanya belanja barang yang bersumber dari dana PNBPN berupa Pengadaan Bahan Laboratorium sebesar Rp.71.190.475, dengan SPK No.1.6/15.0/PL.410/III/2023 Tanggal 06 Maret 2023, SPM No.00093T tanggal 28 April 2023 dan SP2D No.231751301016291 tanggal 03 Mei 2023.
  18. Adanya belanja barang yang bersumber dari dana PNBPN berupa Pembelian Cetakan Perkantoran sebesar Rp.49.900.000, dengan Kwitansi No.04.04/pmd/23 Tanggal 04 April 2023, SPM No.00066T tanggal 04 April 2023 dan SP2D No.231751301012068 tanggal 06 April 2023.
  19. Adanya belanja modal yang bersumber dari dana PNBPN berupa Pengadaan Bahan Laboratorium sebesar Rp.259.900.000, dengan SPK No.01.31/15.0/PL.410/PPK/VII/2023 Tanggal 31 Juli 2023, SPM No.00093T tanggal 28 April 2023 dan SP2D No. 231751302035851 tanggal 09 Oktober 2023.

20. Adanya belanja modal yang bersumber dari dana PNBP berupa Pengadaan Bahan Laboratorium sebesar Rp.78.500.000, dengan SPK No.01.04/15.0/PL.410/PPK/VIII/2023 Tanggal 04 Agustus 2023, SPM No.00093T tanggal 28 April 2023 dan SP2D No. 231751303032533 tanggal 02 November 2023.

# LAMPIRAN

**NERACA**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 31 DESEMBER 2023**  
**(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 032 ) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**UNIT ORGANISASI : ( 13 ) BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN**

**WILAYAH/PROVINSI : ( 0100 ) DKI JAKARTA**

**SATUAN KERJA : ( 649682 ) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA II**

Tgl Data : 14/02/24 6:00 PM

Tgl Cetak : 14/02/24 8:24 PM

Halaman : 1

lap\_neraca\_satker\_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Persediaan	412,602,767	911,640,157	(499,037,390)	(54.74)
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>412,602,767</b>	<b>911,640,157</b>	<b>(499,037,390)</b>	<b>(54.74)</b>
<b>ASET TETAP</b>				
Tanah	10,118,066,000	10,118,066,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	16,359,346,851	15,828,446,955	530,899,896	3.35
Gedung dan Bangunan	10,358,049,540	10,358,049,540	0	0.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	316,816,000	316,816,000	0	0.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	80,140,000	(80,140,000)	(100.00)
AKUMULASI PENYUSUTAN	(15,616,482,379)	(14,452,982,990)	(1,163,499,389)	8.05
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>21,535,796,012</b>	<b>22,248,535,505</b>	<b>(712,739,493)</b>	<b>(3.20)</b>
<b>ASET LAINNYA</b>				
Aset Tak Berwujud	349,800,000	349,800,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(349,800,000)	(262,350,000)	(87,450,000)	33.33
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>0</b>	<b>87,450,000</b>	<b>(87,450,000)</b>	<b>(100.00)</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>21,948,398,779</b>	<b>23,247,625,662</b>	<b>(1,299,226,883)</b>	<b>(5.59)</b>
<b>KEWAJIBAN</b>				
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>				
Utang kepada Pihak Ketiga	38,787,816	37,100,800	1,687,016	4.55
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>38,787,816</b>	<b>37,100,800</b>	<b>1,687,016</b>	<b>4.55</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>38,787,816</b>	<b>37,100,800</b>	<b>1,687,016</b>	<b>4.55</b>
<b>EKUITAS</b>				
<b>EKUITAS</b>				
Ekuitas	21,909,610,963	23,210,524,862	(1,300,913,899)	(5.60)
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>21,909,610,963</b>	<b>23,210,524,862</b>	<b>(1,300,913,899)</b>	<b>(5.60)</b>
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>21,909,610,963</b>	<b>23,210,524,862</b>	<b>(1,300,913,899)</b>	<b>(5.60)</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>21,948,398,779</b>	<b>23,247,625,662</b>	<b>(1,299,226,883)</b>	<b>(5.59)</b>

Keterangan :

FINAL

Jakarta, 14 Februari 2024  
Penanggung Jawab UAKPA  
Kuasa Pengguna Anggaran

DEDI SUPARDI  
198105092005021003



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023  
(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN/LEMBAGA** : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032  
**ESELON I** : BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN 13  
**SATUAN KERJA** : BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA II 649682

Tgl Data : 14/02/24 6:27 PM  
Tgl Cetak : 14/02/24 8:23 PM  
Halaman : 2  
lap\_lra\_face\_satker\_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>a. Dana Perimbangan</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1. Dana Transfer Umum</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Dana Transfer Khusus</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>b. Dana Insentif Daerah</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>c. Dana Keistimewaan DIY</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>d. Dana Otonomi Khusus</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Dana Desa</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3. Hibah Kepada Daerah</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)</b>	<b>14,902,255,000</b>	<b>14,811,041,544</b>	<b>(91,213,456)</b>	<b>99</b>	<b>15,304,483,000</b>	<b>15,193,523,092</b>	<b>(110,959,908)</b>	<b>99</b>
<b>C. PEMBIAYAAN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Jakarta, 14 Februari 2024  
Penanggung Jawab UAKPA  
Kuasa Pengguna Anggaran

DEDI SUPARDI  
198105092005021003

## LAPORAN OPERASIONAL

## TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 032 ) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : ( 13 ) BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : ( 0100 ) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : ( 649682 ) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA II

Tgl Data : 14/02/24 6:27 PM

Tgl Cetak : 14/02/24 8:23 PM

Halaman : 1

lap\_lo\_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	11,177,780,000	9,950,680,000	1,227,100,000	12.332
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	11,177,780,000	9,950,680,000	1,227,100,000	12.332
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	11,177,780,000	9,950,680,000	1,227,100,000	12.332
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	7,687,825,495	7,558,919,919	128,905,576	1.705
Beban Persediaan	1,585,618,697	689,085,475	896,533,222	130.105
Beban Barang dan Jasa	3,643,006,260	3,520,650,402	122,355,858	3.475
Beban Pemeliharaan	879,224,612	746,607,794	132,616,818	17.763
Beban Perjalanan Dinas	1,119,241,990	1,101,834,647	17,407,343	1.58
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

## LAPORAN OPERASIONAL

## TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 032 ) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : ( 13 ) BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : ( 0100 ) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : ( 649682 ) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA II

Tgl Data : 14/02/24 6:27 PM

Tgl Cetak : 14/02/24 8:23 PM

Halaman : 2

lap\_lo\_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1,250,949,389	1,565,213,461	(314,264,072)	(20.078)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	16,165,866,443	15,182,311,698	983,554,745	6.478
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(4,988,086,443)	(5,231,631,698)	243,545,255	(4.655)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	27,608,826	(54,911,000)	82,519,826	(150.279)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	107,748,826	16,000,000	91,748,826	573.43
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	80,140,000	70,911,000	9,229,000	13.015
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	16,801,840	(16,801,840)	(100)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	24,532,820	(24,532,820)	(100)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	7,730,980	(7,730,980)	(100)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	27,608,826	(38,109,160)	65,717,986	(172.447)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(4,960,477,617)	(5,269,740,858)	309,263,241	(5.869)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(4,960,477,617)	(5,269,740,858)	309,263,241	(5.869)

---

Keterangan :

FINAL

Jakarta, 14 Februari 2024  
Penanggung Jawab UAKPA  
Kuasa Pengguna Anggaran

DEDI SUPARDI  
198105092005021003

## LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

## TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 032 ) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : ( 13 ) BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : ( 0100 ) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : ( 649682 ) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA II

Tgl Data : 14/02/24 6:00 PM

Tgl Cetak : 14/02/24 8:23 PM

Halaman : 1

lap\_lpe\_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	23,210,524,862	23,040,763,341	169,761,521	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(4,960,477,617)	(5,269,740,858)	309,263,241	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	968,000	150,610,950	(149,642,950)	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	131,974,857	(131,974,857)	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	968,000	0	968,000	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	18,636,093	(18,636,093)	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	3,658,595,718	5,288,891,429	(1,630,295,711)	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(1,300,913,899)	169,761,521	(1,470,675,420)	-
EKUITAS AKHIR	21,909,610,963	23,210,524,862	(1,300,913,899)	-

Keterangan :

FINAL

Jakarta, 14 Februari 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

DEDI SUPARDI

198105092005021003